**Received:** 16-10-2023| **Accepted:** 31-12-2023| **Published:** 31-12-2023

**JURNAL AN-NASYR: JURNAL DAKWAH DALAM MATA TINTA**

ISSN: 2355-0147 (P); 2807-6893 (E)

**Komunikasi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mempercepat Pelayanan Publik dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat**

**Muhammad Armia1, Munawir2**

1-3Program Magister KPI Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: armiaarismunandar8@gmail.com1, munawir@unisai.ac.id2

### **ABSTRACT**

Fast public service and effective aspiration absorption are two key indicators of responsive and participatory village governance. As a local leader, the village head plays a central role in building open and strategic communication with the community. However, there has been limited research focusing specifically on how village head communication leadership influences public service delivery and citizen engagement in village development. This study aims to examine the role of village head communication in accelerating public service and optimizing the absorption of community aspirations. This research applies a library research method with a descriptive-qualitative approach. Data were collected from various literature sources such as scientific journals, books, articles, and documents related to leadership communication, village public services, and citizen participation. Thematic analysis was used to identify effective communication patterns and their impact on governance practices at the village level. The results indicate that open, participatory, and empathetic communication from village heads significantly accelerates public service and enhances the absorption of citizen aspirations. Communication that is regular and culturally appropriate also strengthens community trust in local leaders. The study concludes that communication is a strategic instrument for building collaborative and just village governance. This research contributes both theoretically and practically to improving the communication capacity of village heads as a vital aspect of local leadership.

**Keywords:** Leadership Communication, Public Service, Community Aspirations

### **ABSTRAK**

Pelayanan publik yang cepat dan penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif merupakan dua indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan partisipatif. Kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki peran sentral dalam menciptakan komunikasi yang terbuka dan strategis dengan warga. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti bagaimana komunikasi kepemimpinan kepala desa memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran komunikasi kepala desa dalam mempercepat pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat secara lebih optimal. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen yang relevan dengan topik komunikasi kepemimpinan, pelayanan publik desa, dan partisipasi warga. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi yang efektif dan dampaknya terhadap tata kelola desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan kepala desa yang bersifat terbuka, partisipatif, dan empatik mampu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat. Komunikasi yang dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal juga memperkuat kepercayaan warga terhadap pemimpinnya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi merupakan instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang kolaboratif dan berkeadilan. Kajian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat kapasitas komunikasi kepala desa sebagai bagian penting dari kepemimpinan lokal.

**Kata Kunci:** Komunikasi Kepemimpinan, Pelayanan Publik, Aspirasi Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Pelayanan publik merupakan elemen mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien menjadi harapan seluruh warga dalam memperoleh hak-haknya dari pemerintah. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya menuntut layanan yang tersedia, tetapi juga layanan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan riil mereka.[[1]](#footnote-1) Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan, termasuk di tingkat desa.

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa menempati posisi yang sangat strategis sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Pemerintahan desa menjadi garda terdepan dalam menjawab persoalan sehari-hari masyarakat, baik terkait layanan administrasi, sosial, maupun pembangunan.[[2]](#footnote-2) Kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan berjalan secara efektif dan merata. Perannya bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang membangun hubungan dengan warganya. Posisi ini menuntut kepala desa untuk tidak hanya menjalankan tugas birokratis, tetapi juga mampu memahami dinamika sosial warganya.

Salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan di tingkat desa terletak pada kemampuan berkomunikasi. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Kepala desa yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan lebih mudah merespons kebutuhan warganya dan membangun suasana partisipatif dalam setiap proses pemerintahan. Melalui komunikasi yang terbuka dan persuasif, kepala desa dapat meminimalisir konflik dan mempercepat implementasi program-program desa. Maka, komunikasi dalam kepemimpinan menjadi alat penting dalam menjembatani kebijakan dengan realitas sosial.

Komunikasi yang efektif juga menjadi sarana penting dalam menjaring aspirasi masyarakat. Aspirasi warga merupakan fondasi dari kebijakan publik yang berpihak dan berkelanjutan, sebab suara masyarakat mencerminkan kebutuhan dan harapan yang nyata. Kepala desa yang mampu mendengarkan dan mengelola aspirasi dengan baik akan lebih mudah menyusun prioritas pembangunan dan menetapkan kebijakan yang tepat sasaran. Komunikasi dua arah, baik melalui forum musyawarah maupun interaksi langsung, menjadi mekanisme penting dalam memperkuat partisipasi warga.[[3]](#footnote-3) Dengan komunikasi yang aspiratif, masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan desa.

Oleh karena itu, komunikasi kepemimpinan kepala desa memiliki peran krusial dalam mempercepat pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat. Kepemimpinan yang komunikatif dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya, menciptakan pemerintahan yang responsif dan inklusif. Tidak hanya memperlancar proses administrasi, komunikasi yang baik juga membangun kepercayaan sosial yang menjadi modal dalam pembangunan jangka panjang.[[4]](#footnote-4) Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana pola komunikasi kepala desa mempengaruhi kualitas layanan dan partisipasi warga. Kajian ini menjadi relevan sebagai kontribusi bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan.

Meskipun kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal, peran komunikasinya dalam mempercepat pelayanan publik belum banyak dikaji secara mendalam. Selama ini, perhatian lebih banyak tertuju pada aspek administratif atau teknis pelayanan, sementara dimensi komunikasi kepemimpinan kerap diabaikan. Padahal, gaya komunikasi seorang pemimpin sangat memengaruhi cara informasi disampaikan, diterima, dan dipahami oleh masyarakat. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan miskomunikasi, kesalahpahaman, bahkan penolakan terhadap program desa. Oleh sebab itu, aspek ini layak mendapat perhatian lebih dalam studi-studi tentang kepemimpinan desa.

Selain itu, belum terdapat pemetaan yang jelas mengenai bagaimana pola komunikasi kepala desa berdampak terhadap proses penyerapan aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya, banyak aspirasi masyarakat yang tidak tertampung dengan baik, bukan karena kurangnya partisipasi, melainkan karena komunikasi yang bersifat satu arah dan tidak terbuka. Kurangnya ruang dialog yang sehat antara pemimpin dan warga menjadi penghambat utama dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.[[5]](#footnote-5) Komunikasi yang partisipatif seharusnya menjadi jembatan antara harapan warga dan realisasi program desa. Namun sayangnya, aspek ini masih menjadi celah dalam pengelolaan pemerintahan desa di banyak wilayah.

Kesenjangan lain yang juga penting untuk ditelusuri adalah bagaimana komunikasi kepemimpinan kepala desa dapat membentuk budaya pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Belum ada kajian komprehensif yang meneliti kontribusi komunikasi sebagai strategi membangun kepercayaan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. Padahal, kepercayaan tersebut merupakan modal sosial utama dalam memperlancar jalannya pelayanan dan pembangunan. Komunikasi yang terbuka dan beretika dapat menjadi sarana membangun legitimasi kepemimpinan kepala desa di mata publik. Maka, kajian ini diperlukan untuk mengisi kekosongan wacana akademik sekaligus memberi arah bagi praktik kepemimpinan desa yang lebih komunikatif dan partisipatif.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, perlu dilakukan kajian yang secara khusus menyoroti peran komunikasi kepala desa dalam mempercepat pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat. Komunikasi bukan hanya sarana penyampaian informasi, tetapi juga instrumen kepemimpinan yang mampu menggerakkan partisipasi warga dan membentuk kepercayaan publik. Dalam konteks desa, kemampuan kepala desa dalam membangun komunikasi yang efektif dapat menjadi penentu utama keberhasilan program-program pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana komunikasi itu dibangun, dipraktikkan, dan berdampak terhadap tata kelola desa.

Penelitian sebelumnya memang telah banyak membahas efektivitas kepemimpinan kepala desa dari aspek administratif, birokrasi, maupun partisipasi masyarakat. Namun, belum banyak yang menggali bagaimana komunikasi sebagai proses sosial berperan dalam membentuk dinamika hubungan antara pemimpin dan warga.[[6]](#footnote-6) Padahal, pendekatan komunikasi yang humanis, terbuka, dan partisipatif dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dimensi strategis yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian kepemimpinan desa. Dengan menelusuri aspek komunikasi, kita bisa memahami secara lebih utuh pola kepemimpinan yang ideal dalam konteks pelayanan publik.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana komunikasi kepemimpinan kepala desa berkontribusi dalam mempercepat pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat secara lebih responsif. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa semakin baik kualitas komunikasi yang dibangun oleh kepala desa, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas pelayanan yang diberikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi komunikasi kepemimpinan lokal, serta rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas kepala desa dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan demikian, komunikasi tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam praktik pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada warga.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian. Penelitian jenis ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan kebijakan, dan dokumen akademik lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun kerangka teoretis yang kuat serta mengidentifikasi pola, konsep, dan perspektif yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Metode ini memungkinkan penulis untuk melihat celah penelitian serta menawarkan pendekatan baru dalam menjelaskan fenomena yang dikaji.[[7]](#footnote-7)

Dalam konteks artikel ini, penelitian kepustakaan dilakukan untuk menelaah konsep komunikasi kepemimpinan, pelayanan publik di tingkat desa, dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya ilmiah dari bidang ilmu komunikasi, administrasi publik, dan pemerintahan desa. Kajian juga mencakup teori-teori komunikasi kepemimpinan, seperti komunikasi dua arah, komunikasi partisipatif, serta pendekatan komunikasi strategis dalam kepemimpinan lokal. Melalui analisis tersebut, penulis berupaya menjelaskan bagaimana komunikasi kepala desa dapat memengaruhi efektivitas pelayanan dan keterlibatan warga dalam pembangunan desa.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan mengorganisasi informasi dari berbagai sumber menjadi satu kerangka pemahaman yang utuh dan sistematis. Penulis membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta kontribusi masing-masing terhadap isu yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga bersifat reflektif dan kritis terhadap praktik komunikasi kepemimpinan di tingkat desa. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala desa melalui komunikasi yang lebih efektif, responsif, dan partisipatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Komunikasi merupakan elemen penting dalam kepemimpinan kepala desa, terutama dalam mempercepat pelayanan publik di tingkat desa. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa kepala desa yang aktif berkomunikasi dengan masyarakat lebih mampu menjelaskan kebijakan dan program dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan desa secara cepat dan tepat. Ketika komunikasi berjalan baik, proses pelayanan menjadi lebih transparan dan efisien. Maka tidak mengherankan bila desa yang dipimpin oleh kepala desa yang komunikatif cenderung memiliki sistem pelayanan yang lebih responsif.

Komunikasi dua arah penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Kepala desa yang membuka ruang dialog dan mendengarkan secara aktif dapat lebih memahami kebutuhan riil masyarakat.[[8]](#footnote-8) Komunikasi semacam ini menciptakan hubungan yang saling percaya dan memperkuat ikatan sosial antara pemimpin dan warganya. Dalam konteks pelayanan publik, kepercayaan ini menjadi kunci untuk memperlancar proses administrasi dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, komunikasi yang partisipatif menjadi strategi penting dalam membangun efektivitas pelayanan.

Komunikasi yang baik juga terbukti mampu mempercepat pengambilan keputusan di tingkat desa. Ketika kepala desa mampu menjelaskan urgensi kebijakan secara komunikatif dan inklusif, maka resistensi dari masyarakat pun dapat diminimalisir. Warga yang merasa dilibatkan akan lebih mudah menerima keputusan dan turut serta dalam pelaksanaan program.[[9]](#footnote-9) Dengan demikian, komunikasi menjadi alat untuk menghindari konflik sekaligus mempercepat proses pembangunan desa. Keputusan yang dibuat pun menjadi lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.

Penyampaian informasi secara rutin dan terjadwal oleh kepala desa memiliki dampak positif terhadap peningkatan literasi publik desa. Warga menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta mengetahui dengan jelas jenis pelayanan yang tersedia. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara terencana memperkuat kehadiran pemerintah desa di mata masyarakat. Ketika kepala desa sering turun langsung menjelaskan program, warga merasa diperhatikan dan dihargai.[[10]](#footnote-10) Hal ini menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun pemerintahan desa yang dekat dan melayani.

Dalam hal penyerapan aspirasi, komunikasi yang empatik dan terbuka menjadi kunci penting. Kepala desa yang memberikan ruang bagi warganya untuk menyampaikan kritik, saran, dan ide, cenderung lebih berhasil merancang kebijakan yang sesuai kebutuhan lokal. Proses penyerapan aspirasi yang sehat juga menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program desa. Aspirasi yang ditampung secara baik memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam bertindak. Oleh karena itu, komunikasi yang aspiratif menjadi fondasi partisipasi warga dalam pembangunan.

Komunikasi informal yang dilakukan oleh kepala desa di luar forum resmi turut berperan dalam memperkuat hubungan sosial. Misalnya, melalui pertemuan di warung kopi, majelis pengajian, atau saat kunjungan rumah ke rumah, kepala desa dapat menggali aspirasi warga secara lebih mendalam. Model komunikasi seperti ini sering kali lebih efektif dalam membangun kedekatan emosional dan kepercayaan. Komunikasi informal menjadi pelengkap dari komunikasi formal yang cenderung lebih kaku.[[11]](#footnote-11) Dengan demikian, kepala desa yang mampu menyeimbangkan kedua jenis komunikasi akan lebih efektif dalam kepemimpinannya.

Transparansi dalam komunikasi berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kepala desa. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat merasa memiliki kontrol terhadap kinerja pemerintah desanya. Hal ini akan mendorong kepala desa untuk bekerja lebih hati-hati, adil, dan sesuai aturan. Komunikasi yang transparan juga menghindarkan munculnya prasangka negatif atau rumor yang menyesatkan. Maka, keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator penting dalam komunikasi kepemimpinan yang sehat.[[12]](#footnote-12)

Media komunikasi desa penting sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi pelayanan publik. Penggunaan media seperti papan pengumuman, media sosial desa, hingga grup WhatsApp warga menjadi penunjang efektif komunikasi. Kepala desa yang adaptif terhadap teknologi komunikasi lebih mampu menjangkau warganya secara cepat dan luas. Kehadiran media ini memperkuat efektivitas komunikasi karena memungkinkan penyampaian informasi secara real-time.[[13]](#footnote-13) Oleh karena itu, integrasi antara komunikasi tatap muka dan digital perlu diperkuat dalam strategi kepemimpinan desa.

Gaya komunikasi yang dialogis dan tidak otoriter lebih disukai oleh masyarakat desa. Kepala desa yang rendah hati, sabar, dan mampu menampung kritik tanpa defensif cenderung mendapat dukungan yang lebih luas. Komunikasi semacam ini mendorong lahirnya budaya diskusi yang sehat dalam kehidupan sosial desa. Warga tidak takut menyampaikan pendapatnya karena merasa dihargai. Budaya komunikasi seperti ini membentuk suasana demokratis dalam lingkup pemerintahan lokal.

Selain itu, komunikasi yang berbasis nilai-nilai lokal dan budaya setempat terbukti lebih efektif dalam menyentuh hati masyarakat. Kepala desa yang memahami adat, bahasa lokal, dan norma sosial lebih mudah diterima dan dihormati. Komunikasi yang kontekstual ini mempermudah penyampaian pesan tanpa menimbulkan resistensi budaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakter sosial masyarakat desa menjadi faktor penting dalam strategi komunikasi kepemimpinan. Penyesuaian bahasa dan gaya komunikasi menjadi indikator kecakapan komunikasi kepala desa yang sukses.

Komunikasi yang konsisten juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika kepala desa konsisten antara ucapan dan tindakan, masyarakat lebih percaya terhadap program yang dijalankan. Ketidakkonsistenan dalam komunikasi, seperti janji yang tidak ditepati, akan cepat menurunkan legitimasi kepemimpinan.[[14]](#footnote-14) Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan, tetapi juga tentang menepati apa yang telah dikomunikasikan. Konsistensi menjadi aspek kunci dalam membangun komunikasi yang kredibel.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penulis menganalisis bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap dalam praktik kepemimpinan kepala desa, tetapi merupakan fondasi dari tata kelola desa yang efektif dan demokratis. Komunikasi yang terbuka, partisipatif, empatik, dan strategis mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komunikasi kepala desa perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Komunikasi yang dikelola dengan baik akan memperkuat legitimasi pemerintahan desa, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan pelayanan yang adil dan inklusif. Dengan demikian, komunikasi menjadi alat utama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan bermartabat.

**PENUTUP**

Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam mempercepat pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat secara lebih efektif. Komunikasi yang terbuka, empatik, dan partisipatif terbukti memperkuat hubungan antara kepala desa dan warganya, sehingga memperlancar alur informasi dan respons kebijakan. Pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan diterima dengan baik oleh masyarakat karena ada keterlibatan langsung dalam proses komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang komunikatif mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Kesimpulan ini diperkuat dengan temuan bahwa kepala desa yang aktif membangun komunikasi baik secara formal maupun informal lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Melalui komunikasi yang konsisten dan transparan, kepala desa dapat membentuk suasana desa yang harmonis dan partisipatif. Penyerapan aspirasi pun berjalan lebih efektif karena warga merasa memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi menjadi modal sosial dan politik yang tidak bisa diabaikan dalam kepemimpinan desa.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah mempertegas pentingnya komunikasi sebagai instrumen strategis dalam kepemimpinan pemerintahan desa. Kajian ini membuka perspektif baru bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberhasilan program, tetapi juga dari cara kepala desa membangun interaksi yang konstruktif dengan masyarakat. Temuan ini diharapkan menjadi pijakan teoretis dan praktis dalam penguatan kapasitas komunikasi kepala desa di berbagai wilayah. Dengan komunikasi yang lebih humanis dan terarah, desa dapat berkembang secara lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

**DAFTAR** **PUSTAKA**

Ferlina, Ameilia. *Peran Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Ponggok Kab. Klaten*. Universitas Islam Indonesia, 2020.

Gulo, Desman Jaya, Prietsaweny Riris T Simamora, and Rahel Sukatendel. “Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat.” *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2022): 93–103.

Hidayatullah, Hidayatullah, and Ulung Pribadi. “Analisis Jaring Aspirasi Melaui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015.” *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016): 339–67.

Maksum, Moh Ja’far Shodiq, and Mochamad Arif Adikara Muchlasin. “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Efektivitas Pelayanan Pemerintah Terhaap Kepuasan Masyarakat.” *Management and Education Journal* 1, no. 2 (2023): 79–86.

Moleong, Lexi. *Metode Penelitian*. Rineka Cipta, 2010.

Ngakil, Ibnu, and M Elfan Kaukab. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 92–107.

Paturohman, Erik. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Musyawarah Oleh Lembaga Bina Desa Di Sauyunan Petani Perempuan Binangkit Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif …, n.d.

Rakhmadani, Riky. “Implementasi Model Komunikasi Dua Arah Dalam Program Curhat Ning Ita Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mojokerto.” *The Commercium* 5, no. 1 (2022): 159–68.

Resti, Anggraini. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.” Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Salvator, Marselinus, and Nanang K Heremba. “Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ngada.” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 3, no. 1 (2023): 42–55.

Silalah, Ulber. *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Uwais inspirasi indonesia, 2023.

Siregar, Mawardi. *Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Langsa Dalam Membangun Kota Yang Islami Dan Ramah Lingkungan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2016.

Syamsuddin, Haslinda. *Komunikasi Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Layanan Publik Di Desa Lebani Kecamatan Maiwa*. IAIN Parepare, 2020.

Wakhid, Ali Abdul, Abd Qohar, and Liky Faizal. “Pergeseran Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi.” *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 2 (2021): 1–17.

1. Ali Abdul Wakhid et al., “Pergeseran Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi,” *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 2 (2021): 1–17. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ulber Silalah, *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* (uwais inspirasi indonesia, 2023). [↑](#footnote-ref-2)
3. Desman Jaya Gulo et al., “Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat,” *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2022): 93–103. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ameilia Ferlina, *Peran Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Ponggok Kab. Klaten*, Universitas Islam Indonesia, 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hidayatullah Hidayatullah and Ulung Pribadi, “Analisis Jaring Aspirasi Melaui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015,” *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016): 339–67. [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh Ja’far Shodiq Maksum and Mochamad Arif Adikara Muchlasin, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Efektivitas Pelayanan Pemerintah Terhaap Kepuasan Masyarakat,” *Management and Education Journal* 1, no. 2 (2023): 79–86. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lexi Moleong, *Metode Penelitian* (Rineka Cipta, 2010); Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2016). [↑](#footnote-ref-7)
8. Riky Rakhmadani, “Implementasi Model Komunikasi Dua Arah Dalam Program Curhat Ning Ita Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mojokerto,” *The Commercium* 5, no. 1 (2022): 159–68. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mawardi Siregar, *Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Langsa Dalam Membangun Kota Yang Islami Dan Ramah Lingkungan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. [↑](#footnote-ref-9)
10. Haslinda Syamsuddin, *Komunikasi Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Layanan Publik Di Desa Lebani Kecamatan Maiwa*, IAIN Parepare, 2020. [↑](#footnote-ref-10)
11. Erik Paturohman, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Musyawarah Oleh Lembaga Bina Desa Di Sauyunan Petani Perempuan Binangkit Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif …, n.d. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibnu Ngakil and M Elfan Kaukab, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo,” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 92–107. [↑](#footnote-ref-12)
13. Marselinus Salvator and Nanang K Heremba, “Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ngada,” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 3, no. 1 (2023): 42–55. [↑](#footnote-ref-13)
14. Anggraini Resti, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran” (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2023). [↑](#footnote-ref-14)